

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teoritis

1. Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (surbakti Ramlan, 2010:179). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga Negara, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga Negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. (sahya anggara, 2013:142)

a. Pengertian partisipasi politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana yang memelopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat "Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum".

Dalam hubungan dengan Negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *no easy choice: political participation in Developing countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan-keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (Miriam Budiardjo, 2008:367-368)

Menurut Michael Rush & Philip Althoff (2003:23), partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik.(Gatara & Said, 2007:90)

Menurut Kevin R Hardwic (dalam frank N Magill,1996), partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. (Gatara & Said, 2007:90)

Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawatahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (political efficacy).

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya

diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang berangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. (Miriam Budiardjo, 2008:368-369)

b. Bentuk-bentuk Partisipasi politik

Dalam buku sosiologi politik bentuk dan hierarki partisipasi politik itu sendiri dalam rangka konsep Rush dan Althoff,

1. Menempati jabatan politik atau administrasi
2. Mencari jabatan politik atau administrasi
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal umum dalam politik
9. Votting (pemberian suara).

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1984:14) mengajukan dua kriteria penjelas.

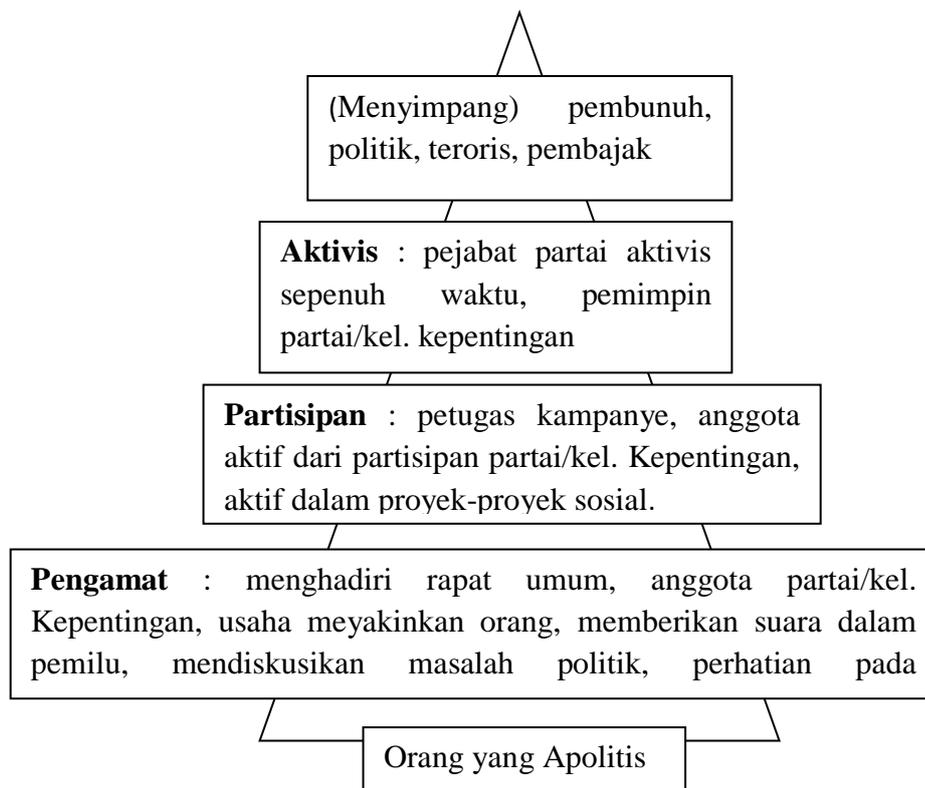
- Dilihat dari dua lingkup atau proposi dari satu kategori warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
- Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”.Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum.Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para akktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok penekan.Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.(Gatara & Said, 2007:93)

Sebagai gambaran ada piramida partisipasi politik dari David F. Roth dan Frank L. Wilson sebagai berikut.

Tabel 1

Piramida partisipasi politik



Dari tabel piramida partisipasi politik di atas bisa terlihat bahwa kepefianya kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, 1980, adalah orang yang apolitis, namun adalah penting untuk dipertimbangkan apakah apatis harus dibatasi sampai pada mereka yang menjauhkan diri dari semua tipe partisipasi politik, termasuk (voting/pemungutan suara) atau apakah istilah tersebut arus

diterapkan secara lebih luas terhadap mereka yang menjauhkan diri dari partisipasi yang aktif, terutama mereka yang menghindari kegiatan lewat organisasi politik atau semu-politik. (Michael Rush, Phillip Althoff, 2005:144)

Kelompok yang berada di atas apolitis adalah pengamat, dan kelompok ini biasanya melakukan kegiatan seperti meyakinkan orang-orang, mengikuti rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik. Kemudian di atas satu tingkatnya adalah partisipan, biasanya partisipan melakukan aktivitas dengan mengadakan kampanye dan sering menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partisipan partai atau kelompok kepentingan dan aktif dalam proyek-proyek sosial seperti adanya pengajian atau pembangunan mesjid, dan kelompok terakhir dari bagian di atas dalam tabel piramida adalah aktivis, warga yang termasuk dalam kelompok aktivis ini sedikit jumlahnya karena kelompok aktivis biasanya terdiri dari pejabat partai sepenuh waktu ataupun kelompok kepentingan dan pemimpin partai.

Bagian terendah adalah mereka yang apatis. Mereka sebetulnya tidak termasuk dalam piramida karena tidak mengikuti permainan tersebut. Namun demikian, agak sulit mengabaikan bentuk ini mengingat dalam realitas politik, kelompok itu memang eksis dan terkadang membawa pengaruh politik.

Milbarth (1965), sebagaimana dikutip Risang Rimbatmaja (2004) melakukan pembagian partisipasi yang rutin ke dalam berbagai kategori, antara lain *ediposic versus continuous*, partisipasi yang episodik adalah partisipasi yang terkait pada

waktu spesifik tertentu, misalnya dalam pemilu. Disisi lain, adalah partisipasi yang terkait pada waktu yang relatif panjang seperti memegang jabatan politis. Dalam bentuk episodic, Milbarth membuat pemetan yang tampaknya masih relevan untuk kondisi sekarang. (Gatara & Said, 2007:94-96)

Berkenaan dengan beragamnya bentuk dan tingkatan partisipasi politik di atas, Gabriel A. Almond membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu :

- Partisipasi politik konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik “normal” dalam demokrasi modern.
- Partisipasi politik non konvensional, yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan (*violence*) dan revolusioner (Mochtar Mas’oed dan MacAndrew, 1995: 48)

Partisipasi politik di Indonesia memiliki dinamika atau pasang surut yang unik dan menarik. Salah satunya dapat dilihat pada partisipasi politik dalam pemilu yang merupakan bentuk partisipasi yang melibatkan seluruh masyarakat. Menurut Abdillah Thoha, partisipasi yang efektif itu harus dimulai dengan adanya keterbukaan dari pihak-pihak masyarakat yang ingin berpartisipasi. Sebab, jika tidak ada keterbukaan, aspirasi-aspirasi yang disalurkan bisa salah arah. (Gatara & Said, 2007:97-100)

2. Pesantren

Secara etimologis, pondok pesantren berasal dari kata pondok dan pesantren, pondok atau fundug (arab), berarti hotel atau asrama, dan peantren atau pesantrian, berarti tempatnya para santri menuntut ilmu. Ada juga yang berpendapat bahwa pesantren berasal dari kata pe-santrian (sansakerta), yang berarti tempat pembinaan orang-orang sehingga menjadi satria atau orang yang unggul, tentu saja dari sudut pandang keagamaan.

Pesantren dengan kyainya, bagi masyarakat tasikmalaya adalah panutan yang memiliki hubungan akidah atau keyakinan agama yang kuat. Karenanya, pesantren dapat pula dipandang sebagai pusat perubahan masyarakat. Pesantren adalah bagian dari sistem kehidupan, yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

1. Eksistensi pesantren sebagai lembaga kehidupan umum
2. Terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung pesantren,
3. Berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri lengkap dengan symbol-simbolnya,
4. Adanya daya tarik ke luar sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri, dan
5. Berlangsungnya suatu proses pengaruh mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya yang akan berakumulasi pada

pembentukan nilai-nilai baru, yang secara iniversal diterima oleh kedua belah pihak (Hakim, 2004:92-93)

Kebanyakan pesantren merupakan suatu kompleks yang secara umum terpisah dari kehidupan sekitarnya. Di dalam kompleks itu ada mesjid, asrama para santri, rumah para pengasuh (kyai atau ajngan), tempat pengajar diberikan (sekolah atau madrasah). Tidak ada aturan umum dalam penciptaan lokasi pesantren ini. Perubahan dan penambahan isi dalam lokasi pesantren hanya didasarkan pada situasi dan kondisi setempat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2
 Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---------------------|--|--|---|
| Wahyu rahma dani | Partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di desa puguh kecamatan boja kabupaten kendal | -meneliti partisipasi politik -bentuk-bentuk partisipasi politik - metode kualitatif | - hasil penelitian - fokus penelitian -tempat penelitian |
| Rezky saputra | Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis tahun 2014 | - Meneliti partisipasi politik - Bentuk-bentuk partisipasi politik - Metode kualitatif | - Fokus penelitian - Lokasi penelitian - Hasil penelitian |

a). persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan penelitian yang dilakukan oleh wahyu rahma dani

perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu ada pada fokus penelitiannya, pada penulisan yang dilakukan wahyu rahma dani yang berjudul partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di desa puguh kecamatan boja kabupaten Kendal sedangkan penulis penelitian terdahulu sekarang yang berjudul bentuk partisipasi politik pesantren Bahrul Ulum kecamatan cibereum di kota tasikmalaya dan hasil penelitian pun berbeda karena hasil dari penelitian penelitian terdahulu bahwa partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu 2009 dengan menjelaskan hasil dari partisipasi pemilih pemulanya, dan lokasi penelitian pun berbeda penelitian terdahulu lokasi penelitiannya berada di kabupaten Kendal sedangkan peneliti sekarang berada di tasikmalaya.

Persamaan untuk penelitian terdahulu yang di tulis oleh wahyu ramha dani yaitu metode yang digunakannya yaitu kualitatif dan ada yang meneliti tentang partisipasi politiknya serta menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik.

b) persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu berbentuk jurnal oleh rezky saputra

perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah dalam fokus penelitian dengan penulisan yang dilakukan rezky saputra yang berjudul partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden di kecamatan Mandau kabupaten bengkalis tahun 2014 sedangkan penulis penelitian sekarang bentuk partisipasi politik di pesantren Bahrul Ulum kecamatan cibereum kota tasikmalaya dan

perbedaan dengan hasil penelitiannya adalah bahwa partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014 dengan menjelaskna hasil dari partisipasi pemilih pemulanya. Begitupun dengan lokasi penelitiannya yang berbeda jika penelitian terdahulu berlokasi di kabupaten bengkalis sedangkan penelitian sekarang berada di kota tasikmalaya.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah menggunakan metode kualitatif dimana akan menjelaskan ssuatu masalah dengan terperinci serta pengambilan data yang benar dan akurat dengan observasi dan wawancara dari berbagai sumber informan.

C. Kerangka Pemikiran



Partisipasi politik merupakan teori dimana masyarakat ikut berpartisipasi atau terlibatnya individu ataupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan secara aktif dalam kehidupan atau proses politik yaitu dengan cara memilih pemimpin, dan dalam teori partisipasi politik ada hubungannya dengan masyarakat karena itu merupakan masyarakat bisa memilih dan masyarakat ikut serta dalam kehidupan politik atau proses politik. Dan bentuk partisipasi politiknya dengan keikutsertaan masyarakat dalam memilih pemimpin, menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai atau pun kelompok kepentingan dan tingkatan dari partisipasi politik itu salah satunya adalah partisipasi dalam diskusi politik informal umum dalam politik dan tingkatan terendahnya pemberian suara. Yang menjadi penelitian ini adalah masyarakat ataupun santri di pesantren bahrul ulum bagaimana partisipasi politiknya.